

1. DEFINISI

1.1. MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL (PT. MUTUAGUNG LESTARI)

Adalah perusahaan jasa sertifikasi, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 33.5 Nomor 19, Cimanggis, Depok, Jawa Barat (nomor telepon 021-8740202, nomor fax 021-87740745/87740746). Sebagai yang menangani jasa sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi adalah Sub Divisi Operasional II SBU Sertifikasi Pertanian, Industri, dan Jasa Publik.

1.2. KLIEN

Adalah pihak yang menjalin kerjasama secara tertulis melalui kontrak /surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan MUTU CERTIFICATION dalam bidang sertifikasi.

1.3. AKREDITASI

Adalah pengakuan yang diberikan oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL (selanjutnya ditulis "KAN") kepada MUTU CERTIFICATION terhadap kegiatan sertifikasi MUTU CERTIFICATION

1.4. AUDIT

Adalah kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen keamanan informasi yang dilakukan oleh personil auditor Mutu Certification International kepada kliennya.

1.5. ISO 17021

Adalah dokumen yang diterbitkan oleh ISO sebagai persyaratan bagi Mutu Certification International selaku lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi.

1.6. SURVEILLANCE

Adalah audit secara *on-site* rutin tahunan selama masa berlaku sertifikasi.

1.7. RESERTIFIKASI

Adalah audit secara *on-site* untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat yang akan (atau telah) berakhir.

1.8. KETIDAKSESUAIAN

Adalah tidak terpenuhinya sebuah persyaratan (kriteria audit dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kriteria audit).

1.9. KELUHAN

Adalah informasi yang diterima Mutu Certification International dari pelanggan klien dan pihak berkepentingan klien (terkait kinerja klien dan proses sertifikasi) maupun dari klien (terkait kinerja Mutu Certification International).

1.10. BANDING

Adalah proses yang diajukan klien jika merasa tidak menerima keputusan sertifikasi (termasuk keputusan penghentian atau pencabutan sertifikasi) yang dilakukan oleh Mutu Certification International.

1.11. KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

Adalah keadaan di luar kemampuan pihak yang mengalaminya, antara lain berupa bencana alam, banjir, badai, kejadian yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana alam, huru hara, kebakaran, sabotase, peperangan, epidemi dan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang diakibatkan oleh kelalaian, kealpaan, kecerobohan dan/ atau ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan.

2. PENGANTAR

Dokumen ini disusun:

- a. Untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada Mutu Certification International yang mewajibkan lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) menginformasikan mengenai mekanisme sertifikasi yang dijalankan.

- b. Untuk memberikan gambaran mekanisme sertifikasi SMKI kepada pihak calon klien maupun klien Mutu Certification International.
- c. Bersama dengan aplikasi, dokumen penawaran, dan aturan penggunaan logo yang diterbitkan dan disyaratkan oleh Mutu Certification International menjadi bentuk syarat dan ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Mutu Certification International dengan pihak-pihak terkait.
- d. Menerangkan hak, tanggung jawab, tugas dan lingkup bisnis Mutu Certification International

Mutu Certification International memperhatikan peningkatan kinerjanya secara berkelanjutan dan bertekad untuk:

- Menyediakan layanan sertifikasi lingkup nasional dan internasional.
- Menyediakan layanan yang cepat, akurat, efisien, dan taat aturan.
- Mengutamakan kepuasan klien, konsumen, dan pihak lain yang berkepentingan.
- Mengutamakan kelestarian lingkungan.
- Memfasilitasi dan mendukung peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas barang dan jasa, dan perlindungan lingkungan.
- Menjunjung tinggi ketidakterbukaan, objektivitas, dan bebas konflik kepentingan dalam melakukan kegiatan sertifikasi.
- Meningkatkan kemampuan karyawan secara terus menerus dan menyediakan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan di atas.

3. SERTIFIKASI DAN AKREDITASI

Jasa sertifikasi SMKI yang dilakukan Mutu Certification International belum mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

4. URUTAN PROSES SERTIFIKASI

Urutan proses kegiatan sertifikasi SMKI secara umum dijelaskan di bawah ini dan secara lebih rinci dijelaskan dalam masing-masing bagian dalam dokumen aturan pelaksanaan ini.

- a. Pengisian aplikasi oleh calon klien
- b. Tinjauan aplikasi oleh Mutu Certification International
- c. Persetujuan biaya dan pembuatan kontrak / SPK sertifikasi antara Mutu Certification International dan klien.
- d. Audit awal, terdiri dari audit awal tahap 1 dan tahap 2
- e. Pengambilan keputusan sertifikasi oleh Mutu Certification International
- f. Penerbitan sertifikat oleh Mutu Certification International
- g. Audit surveillance pertama oleh Mutu Certification International
- h. Audit surveillance kedua oleh Mutu Certification International
- i. Audit resertifikasi oleh Mutu Certification International

5. APLIKASI

- 5.1. Calon klien dipersilakan untuk mengisi formulir aplikasi sertifikasi SMKI dengan meminta formulir aplikasi secara langsung kepada tim administrasi ataupun sales Mutu Certification International.
- 5.2. Formulir aplikasi yang telah diisi lengkap agar dapat dikirimkan melalui surel ke msc@mutucertification.com atau melalui alamat surel tim sales yang menghubungi calon klien.

6. AUDIT AWAL

- 6.1. Audit awal terdiri dari audit awal tahap 1 dan audit awal tahap 2.
- 6.2. Audit awal tahap 1 bertujuan melihat kesiapan klien sebelum dilakukan audit awal tahap 2. Sedangkan audit awal tahap 2

bertujuan untuk menilai kesesuaian SMKI terhadap standar penilaian masing-masing skema.

- 6.3. Apabila tidak diminta oleh klien, audit awal tahap 1 akan dilakukan secara off site, yaitu tim audit melakukan audit tahap 1 dengan meninjau formulir penilaian mandiri yang diisi klien dan jika diperlukan meninjau beberapa dokumen yang dimiliki klien.
- 6.4. Interval waktu antara audit awal tahap 1 dan tahap 2 adalah sedemikian rupa sehingga klien dapat terlebih dahulu menindaklanjuti hasil audit awal tahap 1 yang wajib diselesaikan sebelum audit tahap 2.
- 6.5. Audit awal tahap 2 wajib dilakukan secara *on-site* (tim audit berkunjung ke lokasi klien) dengan durasi sesuai tinjauan aplikasi yang dibuat oleh Mutu Certification International.
- 6.6. Audit awal tahap 2 dapat dilakukan secara jarak jauh melalui jaringan internet untuk beberapa area audit. Tim auditor akan memutuskan apabila suatu audit memungkinkan untuk dilakukan audit jarak jauh dan akan menginformasikan hal tersebut kepada klien.
- 6.7. Apabila dari audit awal tahap 2 ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka klien dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada pasal 13.

7. PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

Pengambilan keputusan sertifikasi adalah proses peninjauan oleh Komite Sertifikasi (satu atau lebih personil yang ditunjuk oleh Mutu Certification International di luar tim auditor), untuk memutuskan apakah klien layak mendapatkan sertifikat, baik sertifikat baru ataupun sertifikat yang diterbitkan ulang karena kegiatan audit resertifikasi, audit perubahan lingkup sertifikasi, atau kegiatan audit khusus lainnya yang memerlukan penerbitan sertifikat.

8. SERTIFIKAT

- 8.1. Sertifikat klien pasca audit tahap awal memiliki masa berlaku 3 tahun sejak tanggal keputusan sertifikasi.
- 8.2. Sertifikat klien yang diterbitkan pasca audit resertifikasi (pada tahun ketiga dan kelipatannya) dapat berlaku lebih panjang atau lebih pendek tergantung pada waktu selesai seluruh rangkaian kegiatan resertifikasi

9. AUDIT SURVEILLANCE

- 9.1. Audit surveillance merupakan kewajiban bersama antara Mutu Certification International dan klien setelah diterbitkan sertifikat sebagai bentuk pemeliharaan sertifikat dan pengawasan berkala kesesuaian SMKI yang dijalankan klien.
- 9.2. Audit surveillance wajib dilakukan secara *on-site* sebanyak 2 kali selama masa berlaku sertifikat.
- 9.3. Audit surveillance dapat dilakukan secara jarak jauh melalui jaringan internet untuk beberapa area audit. Tim auditor akan memutuskan apabila suatu audit memungkinkan untuk dilakukan audit jarak jauh dan akan menginformasikan hal tersebut kepada klien.
- 9.4. Jatuh tempo audit surveillance adalah sebagai berikut

Tipe klien	Surveillance 1	Surveillance 2
Klien baru*	7-12 bulan sejak tanggal terbit sertifikat	17-12 bulan sebelum tanggal berakhir sertifikat
Klien lama**	29-24 bulan sebelum tanggal berakhir sertifikat	
*Klien baru adalah klien yang belum pernah melewati audit resertifikasi		
**Klien lama adalah klien yang pernah melewati audit resertifikasi.		

- 9.5. Apabila dari audit surveillance ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka klien dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih

rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada pasal 13.

10. AUDIT RESERTIFIKASI

- 10.1. Audit resertifikasi dapat dilakukan secara jarak jauh melalui jaringan internet untuk beberapa area audit. Tim auditor akan memutuskan apabila suatu audit memungkinkan untuk dilakukan audit jarak jauh dan akan menginformasikan hal tersebut kepada klien.
- 10.2. Rangkaian audit resertifikasi, yaitu pelaksanaan audit sampai dengan pengambilan keputusan sertifikasi, wajib dilaksanakan sebelum masa berakhir sertifikat. Jika tidak demikian maka klien akan memiliki sertifikat yang sudah kadaluarsa.
- 10.3. Apabila dari audit resertifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka klien dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada pasal 13.
- 10.4. Setelah sertifikat kadaluarsa, klien masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan rangkaian audit resertifikasi dalam waktu 6 bulan untuk dilaksanakan audit, penyelesaian tindakan perbaikan, sampai dengan pengambilan keputusan sertifikasi. Namun demikian jika hal ini terjadi maka sertifikat yang akan diterbitkan berlaku kurang dari 3 tahun dikarenakan menyambung masa berlaku sertifikat sebelumnya. Apabila rangkaian audit resertifikasi masih belum diselesaikan sampai dengan 6 bulan sejak sertifikat kadaluarsa, maka klien diwajibkan mengulangi audit awal tahap 2.

11. AUDIT KHUSUS

- 11.1. Audit khusus dapat dilakukan dikarenakan beberapa hal, antara lain permohonan penambahan (perluasan) lingkup sertifikasi dari klien, verifikasi tim auditor terhadap perbaikan hasil audit, atau audit tiba-tiba.
- 11.2. Audit khusus karena penambahan lingkup sertifikasi dilakukan jika klien mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikasi. Diawali dengan permohonan tertulis oleh klien menginformasikan penambahan lingkup yang diinginkan, yang akan ditinjau oleh personil peninjau aplikasi untuk memutuskan apakah perluasan dapat diterima atau tidak. Audit khusus untuk penambahan lingkup sertifikasi dapat dilakukan secara tersendiri atau bersamaan dengan audit surveillance atau resertifikasi.
- 11.3. Audit khusus dalam rangka verifikasi tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang muncul ketika audit akan dilakukan berdasarkan pertimbangan tim audit. Tim audit, ketika rapat penutupan (dan di dalam laporan audit), akan memutuskan apakah tindakan perbaikan hanya dapat diverifikasi melalui kunjungan ulang tim audit
- 11.4. Audit khusus secara tiba-tiba, atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada klien, untuk menginvestigasi keluhan yang diterima, atau sebagai bentuk respon terhadap perubahan, atau sebagai tindak lanjut pembekuan sertifikat klien.
- 11.5. Biaya yang muncul dari audit khusus menjadi tanggungan klien yang besarnya diatur dalam kontrak / SPK sertifikasi.

12. RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

- 12.1. Kegiatan audit oleh Mutu Certification International kepada kliennya dibatasi oleh ruang lingkup tertentu yang dinyatakan dalam dokumen sertifikat yang diterbitkan Mutu Certification International.

- 12.2. Klien tidak diperkenankan untuk dalam bentuk apapun menyatakan dirinya telah mendapatkan sertifikasi di luar dari ruang lingkup sertifikasi.
- 12.3. Klien dapat mengajukan permohonan perubahan ruang lingkup sertifikasi kepada Mutu Certification International untuk ditinjau perlunya perubahan perjanjian kerja atas pengajuan perubahan lingkup tersebut.
- 12.4. Klien tidak diperkenankan mengajukan permohonan perubahan ruang lingkup sertifikasi secara langsung kepada tim auditor Mutu Certification International ketika pelaksanaan audit rutin.

13. KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK LANJUT PERBAIKAN

- 13.1. Terdapat 2 kategori ketidaksesuaian kategori major dan ketidaksesuaian kategori minor.
- 13.2. Ketidaksesuaian kategori major
 - a. Ketidaksesuaian major adalah ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem manajemen keamanan informasi organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan.
 - b. Batas waktu bagi klien menindaklanjuti ketidaksesuaian kategori major adalah 4 bulan jika audit tahap awal, 1 bulan jika audit tahap surveillance, dan sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat jika audit tahap resertifikasi
 - c. Kegagalan klien perbaikan ketidaksesuaian kategori major akan berdampak pada mekanisme pembekuan dan penarikan sertifikat yang diatur dalam Prosedur Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat (MUTU 214) dan pasal 14 dokumen aturan pelaksanaan sertifikasi ini.
- 13.3. Ketidaksesuaian kategori minor
 - a. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang tidak mempengaruhi kemampuan sistem manajemen keamanan informasi organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan.
 - b. Batas waktu bagi klien untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian kategori minor adalah 4 bulan jika audit tahap awal, 2 bulan jika audit tahap surveillance, dan sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat jika audit tahap resertifikasi
 - c. Kegagalan klien melakukan perbaikan ketidaksesuaian kategori minor akan berdampak pada mekanisme pembekuan dan penarikan sertifikat yang diatur dalam Prosedur Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat (MUTU 214) dan pasal 14 dokumen aturan pelaksanaan sertifikasi ini.
- 13.4. Saran
 - a. adalah temuan audit yang bukan merupakan pelanggaran terhadap sebuah persyaratan (kriteria audit dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kriteria audit).
 - b. Saran umumnya adalah potensi peningkatan pada klien dan/atau potensi ketidaksesuaian yang dapat terjadi di masa mendatang.
 - c. Walaupun tidak diwajibkan, klien diharapkan menindaklanjuti saran yang diberikan tim audit kecuali memiliki alasan yang kuat untuk tidak menindaklanjutinya. Tim audit yang bertugas pada audit selanjutnya akan meninjau saran ditindaklanjuti oleh klien atau tidak ditindaklanjuti karena pertimbangan tertentu. Saran tidak akan secara sendirinya menjadi ketidaksesuaian selama tetap tidak terjadi kondisi pelanggaran persyaratan (kriteria audit dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kriteria audit).

Tabel berikut ini menjelaskan perbedaan definisi ketidaksesuaian major dan minor beserta batas waktu perbaikan.

MAJOR	MINOR
a. Ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem manajemen keamanan informasi untuk mencapai hasil yang diharapkan b. Ketidaksesuaian akibat penggunaan logo sertifikasi yang tidak sesuai ruang lingkup sertifikasi Batas waktu perbaikan: - Tahap awal = 4 bulan - Surveillance = 1 bulan - Resertifikasi = hingga berakhir sertifikat	a. Ketidaksesuaian yang tidak mempengaruhi kemampuan sistem manajemen keamanan informasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. b. Ketidaksesuaian akibat kesalahan penggunaan logo sertifikasi secara umum. Batas waktu perbaikan: - Tahap awal = 4 bulan - Surveillance = 2 bulan - Resertifikasi = hingga berakhir sertifikat

14. PEMBEKUAN DAN PENARIKAN SERTIFIKAT

- 14.1. Mutu Certification International berhak melakukan pembekuan sertifikasi dan penarikan sertifikat dikarenakan beberapa kondisi yang terjadi seperti:
 - a. Terdapat ketidaksesuaian hasil audit surveillance yang belum dapat ditutup (close) oleh tim auditor melewati batas waktu perbaikan
 - b. Kegiatan audit surveillance tidak dapat terlaksana melebihi jatuh tempo pelaksanaan audit surveillance
 - c. Tidak terealisasinya pelunasan pembayaran kegiatan audit oleh klien.
- 14.2. Masa pembekuan sertifikat adalah maksimal 6 bulan dan dalam masa tersebut hak-hak sertifikasi klien, seperti penggunaan logo dan pernyataan sertifikasi, untuk sementara tidak dapat dipergunakan.
- 14.3. Apabila klien tidak menindaklanjuti kondisi yang menyebabkan sertifikatnya dibekukan, maka Mutu Certification International akan melakukan penarikan sertifikat.
- 14.4. Mutu Certification International akan mempublikasikan perihal pembekuan dan penarikan sertifikat melalui situs www.mutucertification.com.
- 14.5. Penarikan sertifikat juga dilakukan oleh Mutu Certification International kepada sertifikat klien yang sudah tidak berlaku karena telah diterbitkan sertifikat baru dengan pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- 14.6. Apabila sertifikat klien ditarik, maka klien berkewajiban mengembalikan sertifikat kepada Mutu Certification International.

15. PERUBAHAN ORGANISASI KLIEN

- 15.1. Klien berkewajiban untuk sesegera mungkin menginformasikan Mutu Certification International mengenai perubahan-perubahan di organisasinya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dapat mempengaruhi kapabilitas sistem manajemen keamanan informasi yang disertifikasi dalam memenuhi persyaratan standar sistem manajemen keamanan informasi atau ekolabel, antara lain:
 - a. Perubahan status organisasi, hukum, komersial, atau kepemilikan
 - b. Perubahan manajemen dan organisasi (misalnya perubahan personel manajemen kunci, pengambil keputusan, atau staf teknis)
 - c. Perubahan lokasi dan alamat
 - d. Perubahan operasional yang berada dalam lingkup manajemen sistem yang disertifikasi (misalnya pengurangan, penghapusan, penghentian sementara aktivitas yang tercakup dalam lingkup sertifikasi, termasuk penambahan aktivitas yang dilakukan

organisasi yang belum tercakup dalam lingkup sertifikasi).

- e. Perubahan besar terkait sistem manajemen keamanan informasi yang diterapkan, termasuk perubahan pengendalian risiko keamanan informasi.
- 15.2. Informasi perubahan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 15.1 di atas wajib diinformasikan kepada Mutu Certification International secara tertulis kepada Mutu Certification International
- 15.3. Mutu Certification International akan meninjau informasi perubahan untuk mengetahui apakah perubahan yang terjadi:
- a. mempengaruhi lingkup sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi yang diberikan,
 - b. memerlukan audit khusus,
 - c. memerlukan penambahan waktu audit,
 - d. mempengaruhi biaya sertifikasi
- Hasil tinjauan akan diinformasikan kepada klien untuk dapat merealisasikan tindakan yang diperlukan.
- 15.4. Jika diperlukan, sertifikat klien akan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dengan melalui proses keputusan sertifikasi.

16. KERAHASIAAN DAN KETIDAKBERPIHAKAN

- 16.1. Seluruh personil karyawan dan/atau yang bekerja atas nama Mutu Certification International akan menjaga kerahasiaan terhadap proses sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi yang dilakukan kepada organisasi klien
- 16.2. Kerahasiaan tidak berlaku apabila dipersyaratkan oleh hukum, Komite Akreditasi Nasional, atau pihak-pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari klien dan/atau yang diatur oleh persyaratan perundangan.
- 16.3. Kewajiban terkait kerahasiaan akan tetap berlaku meskipun setelah pemutusan kerjasama sertifikasi.
- 16.4. Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Mutu Certification International tidak memihak salah satu pihak, bebas dari ancaman konflik kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.
- 16.5. Untuk menjaga ketidakberpihakan, putusan lembaga sertifikasi mendasari pada bukti objektif pengamatan di lapangan dan putusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain.

17. BANDING DAN KELUHAN

- 17.1. Banding diajukan klien secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah tanggal keputusan sertifikasi, ditujukan kepada manajemen Mutu Certification International melalui surel datacenter@mutucertification.com, disertai dengan bukti-bukti dan data-data yang relevan sebagai bahan pertimbangan proses penyelesaian banding oleh Mutu Certification International.
- 17.2. Keluhan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis, baik kepada manajemen Mutu Certification International melalui surel datacenter@mutucertification.com atau secara langsung kepada bagian teknis sertifikasi (Sub Divisi Operasional II SBU Sertifikasi Pertanian, Industri, dan Jasa Publik) melalui surel msc@mutucertification.com.
- 17.3. Penyelesaian keluhan dan banding oleh Mutu Certification International dilakukan berdasarkan prosedur prosedur MUTU-215 (Keluhan, Perselisihan, dan Banding) yang tersedia untuk publik melalui situs web Mutu Certification International (www.mutucertification.com).

18. PUBLIKASI

- 18.1. Publikasi terkait sertifikat dapat dilakukan oleh Mutu Certification International maupun klien.
- 18.2. Publikasi yang dilakukan oleh Mutu Certification International dilakukan dengan cara menampilkan nama organisasi klien yang sudah mendapatkan sertifikat di situs www.mutucertification.com, bersama dengan lingkup dan status sertifikasinya.
- 18.3. Publikasi yang dapat dilakukan oleh klien mencakup penggunaan logo sertifikasi maupun pernyataan (klaim) sertifikasi yang dilakukan sendiri. Penggunaan logo sertifikasi dan pernyataan sertifikasi oleh klien mengacu kepada aturan penggunaan logo sertifikasi yang diterbitkan Mutu Certification International dan tersedia untuk diunduh melalui situs web www.mutucertification.com. Penggunaan logo sertifikasi yang menyalahi aturan penggunaan logo sertifikasi dianggap sebagai sebuah ketidaksesuaian yang harus diperbaiki oleh klien.

19. PEMINDAHAN (TRANSFER) SERTIFIKASI

- 19.1. Mutu Certification International dapat melanjutkan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi dari lembaga sertifikasi lain dengan beberapa persyaratan.
- 19.2. Hanya sertifikasi dari lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi yang mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi yang tergabung dalam *International Accreditation Forum* (IAF) yang dapat dilanjutkan oleh Mutu Certification International.
- 19.3. Informasi permohonan pemindahan sertifikasi kepada Mutu Certification International dilakukan oleh calon klien dengan beberapa informasi pendukung.
- 19.4. Tinjauan pra-pemindahan Mutu Certification International akan melakukan tinjauan terhadap permohonan pemindahan yang mencakup aspek-aspek:
- a. Alasan permohonan pemindahan
 - b. Keaslian, status, dan masa berlaku sertifikat calon klien pemindahan
 - c. Laporan audit terakhir dari lembaga sertifikasi yang akan memindahkan proses sertifikasi
 - d. Keluhan terhadap sistem manajemen keamanan informasi calon pemindahan
 - e. Status hukum organisasi calon pemindahan
- Persyaratan pemindahan sertifikasi yang dapat diproses adalah jika:
- a. Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui oleh lembaga akreditasi, tidak sedang dalam masa pembekuan, dan masih dalam masa berlaku.
 - b. Ketidaksesuaian dari hasil audit terakhir telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.
 - c. Organisasi calon pemindahan tidak sedang dalam proses penyelesaian hukum
 - d. Organisasi calon pemindahan tidak sedang dalam penanganan keluhan dari pihak berkepentingan.
- 19.5. Apabila persyaratan dalam pasal 19.4 terpenuhi, Mutu Certification International dapat melanjutkan proses sertifikasi sesuai siklus normal klien ketika disertifikasi oleh lembaga sertifikasi terdahulunya.

20. PEMENUHAN REGULASI

Klien bertanggung jawab untuk selalu patuh terhadap regulasi yang berlaku dan yang terkait dengan skema sertifikasinya, misalnya:

- a. Peraturan wajib terkait produk atau jasa yang disertifikasi, misalnya pada sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi mutu

- b. Regulasi terkait lingkungan, misalnya pada sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi lingkungan dan ekolabel
- c. Regulasi terkait anti korupsi, misalnya pada sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi anti penyuapan.

21. KEBIJAKAN ANTI SUAP DAN KODE ETIK

- 21.1. Berdasarkan atas prinsip ketidakberpihakan, Mutu Certification International memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap menyuap dari/kepada klien dan pihak lainnya. Kebijakan anti-suap Mutu Certification International menjelaskan secara rinci tentang jaminan anti suap terhadap seluruh karyawan, auditor, sub-kontraktor, dan para stakeholder lainnya.
- 21.2. Mutu Certification International dan kliennya bertanggung jawab untuk memastikan semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dengan melaksanakan praktek kerja yang baik dan berperilaku sesuai standar profesional yang tinggi. Tindakan atau perilaku profesional sangat penting untuk keberhasilan bisnis Mutu Certification International dan kliennya.

22. KEADAAN KAHAR

- 22.1. Rangkaian kegiatan sertifikasi sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 dapat dibatalkan dan/atau ditunda pelaksanaannya apabila Mutu Certification International dan/atau kliennya mengalami keadaan kahar.
- 22.2. Mutu Certification International dan/atau kliennya wajib saling memberitahukan secara tertulis kepada salah satu pihak lainnya apabila mengalami keadaan kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak keadaan kahar terjadi, dengan memberikan penjelasan dan perkiraan dimulainya lagi pelaksanaan kegiatan yang tertunda.
- 22.3. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya sebab Keadaan Kahar, dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar salah satu pihak (Mutu Certification International atau kliennya)
- 22.4. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Keadaan Kahar akan diselesaikan oleh Mutu Certification International dan kliennya secara musyawarah.